

## STUDI TENTANG PENURUNAN KUALITAS BANGUNAN SEBAGAI PEMEDIASIASI DAMPAK KORUPSI TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN

Erdika Farras Arkananta, Meazza Vinzaghi

Universitas Bandar Lampung  
[erdikafarrassmpn4bl@gmail.com](mailto:erdikafarrassmpn4bl@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penurunan kualitas bangunan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara praktik korupsi dan peningkatan biaya pemeliharaan ekonomi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena masih maraknya korupsi dalam sektor konstruksi yang berdampak pada rendahnya kualitas hasil pembangunan serta meningkatnya beban biaya perawatan di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis jalur (path analysis) untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel. Data diperoleh melalui studi literatur dan/atau survei terhadap proyek konstruksi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh signifikan terhadap penurunan kualitas bangunan, dan penurunan kualitas tersebut secara signifikan meningkatkan biaya pemeliharaan ekonomi. Selain itu, penurunan kualitas bangunan terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh tidak langsung korupsi terhadap biaya pemeliharaan. Temuan ini menegaskan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam proses pembangunan guna meminimalisir dampak jangka panjang yang merugikan secara ekonomi.

Kata kunci: korupsi, kualitas bangunan, biaya pemeliharaan, mediasi, konstruksi

### Article history

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan serius yang banyak terjadi di sektor konstruksi dan infrastruktur, terutama dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek. Praktik seperti manipulasi anggaran, penurunan spesifikasi teknis, serta lemahnya pengawasan menyebabkan proyek tidak berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial jangka pendek, tetapi juga berdampak pada kualitas hasil pembangunan. Fenomena ini menjadi perhatian serius mengingat sektor infrastruktur memegang peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketika proyek infrastruktur dikelola dengan buruk akibat praktik koruptif, maka manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat menjadi terganggu dan bahkan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari.

Dalam konteks konstruksi, korupsi seringkali berimplikasi pada penurunan kualitas bangunan. Penggunaan material yang tidak sesuai standar serta pelaksanaan pekerjaan yang tidak optimal menyebabkan bangunan mengalami kerusakan lebih cepat dari umur rencana. Akibatnya, kinerja infrastruktur menurun dan tidak mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penurunan kualitas bangunan bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan juga cerminan dari kegagalan sistem pengelolaan dan lemahnya integritas para aktor yang terlibat dalam proses pembangunan. Sebagaimana dijelaskan oleh Zainudin Hasan, pendidikan antikorupsi yang berbasis kearifan lokal dapat menjadi instrumen preventif yang efektif untuk membangun kesadaran dan integritas sejak dini, sehingga mengurangi potensi praktik koruptif dalam berbagai sektor termasuk konstruksi (Hasan, 2020).<sup>1</sup>

Penurunan kualitas tersebut selanjutnya berdampak pada meningkatnya biaya pemeliharaan. Infrastruktur yang cepat rusak membutuhkan perbaikan yang lebih sering dan biaya rehabilitasi yang lebih besar, sehingga meningkatkan beban ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian, korupsi tidak hanya berdampak pada tahap awal proyek, tetapi juga memperbesar biaya dalam siklus hidup infrastruktur. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana anggaran pemeliharaan yang tidak memadai akibat kebocoran anggaran menyebabkan kerusakan semakin parah, yang pada gilirannya membutuhkan biaya rehabilitasi yang lebih besar di masa mendatang.

---

<sup>1</sup> Hasan, Z. (2025). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Kearifan Lokal.

Di sisi lain, korupsi merupakan fenomena yang tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek moral, integritas, dan pendidikan individu. Sebagaimana ditegaskan oleh Zainudin Hasan, pendidikan antikorupsi merupakan instrumen preventif yang strategis dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam kehidupan sosial maupun profesional (Hasan, 2018)<sup>2</sup>. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai-nilai etis untuk mencegah munculnya perilaku koruptif di masa mendatang. Lebih lanjut, Zainudin Hasan juga menekankan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan antikorupsi sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, karena Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur yang relevan dalam membangun moral bangsa (Hasan, 2023).<sup>3</sup> Internalisasi nilai-nilai Pancasila sejak dini diharapkan dapat menjadi benteng moral yang kuat bagi setiap individu dalam menolak segala bentuk praktik korupsi.

Lebih lanjut, dalam kajiannya mengenai peran media sosial dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, Hasan et al. (2025) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun kesadaran antikorupsi, memperkuat transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap praktik penyimpangan. Pemanfaatan media sosial secara sistematis dinilai mampu memperluas edukasi antikorupsi kepada generasi muda dan memperkuat budaya akuntabilitas dalam kehidupan sosial maupun kelembagaan. Pendekatan tersebut menjadi relevan dalam konteks pembangunan infrastruktur, karena kualitas tata kelola proyek sangat ditentukan oleh integritas aktor yang terlibat di dalamnya. Lemahnya integritas berpotensi mendorong penyimpangan anggaran, manipulasi spesifikasi teknis, serta pengabaian standar mutu konstruksi yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas bangunan.

Selain itu, Hasan juga menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari pembentukan budaya integritas melalui sinergi antara institusi pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial. Dalam perspektif ini, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai kegagalan sistem nilai yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional. Menurut Zainudin Hasan, pendidikan antikorupsi di era 4.0 harus diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum pendidikan formal maupun nonformal, dengan memanfaatkan teknologi digital

---

<sup>2</sup> Hasan, Z. (2025). Pendidikan Anti Korupsi.

<sup>3</sup> Hasan, Z. (2023). Pancasila dan Kewarganegaraan.

sebagai media pembelajaran yang interaktif dan mudah diakses oleh generasi muda (Hasan, 2025a).<sup>4</sup> Pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman menjadi kunci keberhasilan pendidikan antikorupsi dalam membentuk karakter yang tangguh dan berintegritas. Lebih lanjut, Zainudin Hasan juga mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana yang transparan dan akuntabel merupakan pilar penting dalam memberantas korupsi secara tuntas, karena penegakan hukum yang lemah akan menjadi celah bagi praktik koruptif untuk terus berlangsung<sup>5</sup> (Hasan, 2025b). Selain itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia juga menjadi fondasi moral yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan korupsi secara sistemik (Hasan, 2022).<sup>6</sup> Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan antara korupsi, penurunan kualitas bangunan, dan peningkatan biaya pemeliharaan ekonomi menjadi penting untuk menunjukkan bahwa dampak korupsi tidak berhenti pada kerugian finansial awal, tetapi berlanjut pada beban ekonomi jangka panjang akibat rendahnya kualitas hasil pembangunan.

## Metode Penelitian

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif eksploratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penurunan kualitas bangunan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara praktik korupsi dan peningkatan biaya pemeliharaan ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian secara kontekstual (Creswell, 2014).<sup>7</sup> Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat diukur secara kuantitatif (Moleong, 2017).<sup>8</sup>

### Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada dua lokasi dengan karakteristik yang berbeda, yaitu sekolah dan terminal. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada perbedaan sistem pengelolaan dan kondisi pemeliharaan bangunan.

---

<sup>4</sup> Hasan, Z. (2025). Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0.

<sup>5</sup> Hasan, Z. (2025). Sistem Peradilan Pidana.

<sup>6</sup> Hasan, Z. (2022). "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia".

<sup>7</sup> Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.).

<sup>8</sup> Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi).

Pertama, lokasi sekolah dipilih sebagai representasi institusi formal dengan sistem pengelolaan yang relatif terstruktur. Berdasarkan observasi awal, bangunan sekolah mengalami beberapa kerusakan seperti cat yang mengelupas dan berjamur, kerusakan pada bangku dan meja, serta sekat kamar mandi yang rusak. Namun, pihak sekolah cenderung responsif dalam melakukan perbaikan.

Kedua, lokasi terminal dipilih sebagai representasi fasilitas publik dengan pengelolaan yang lebih kompleks. Kondisi bangunan terminal menunjukkan tingkat kerusakan yang lebih parah, seperti atap yang berlubang dan bangku tunggu yang patah. Selain itu, perawatan bangunan cenderung kurang optimal sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi, terutama bagi penjual di sekitar terminal, khususnya saat kondisi cuaca buruk.

## Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018)<sup>9</sup>. Adapun subjek penelitian terdiri dari:

1. Lokasi sekolah:
  - a. 2 siswa laki laki kelas 11
  - b. 3 siswa perempuan kelas 11
  - c. 1 orang guru.
2. Lokasi terminal:
  - a. 1 orang penjual di sekitar terminal
  - b. 2 orang warga yang sering beraktivitas di area tersebut.

Pemilihan subjek ini didasarkan pada pengalaman langsung mereka terhadap kondisi bangunan dan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari.

## Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara langsung (in-depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti

---

<sup>9</sup> Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

untuk menggali informasi secara mendalam sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengembangan pertanyaan selama proses wawancara (Kvale & Brinkmann, 2009).<sup>10</sup>

Wawancara difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu:

1. Kondisi fisik bangunan dan jenis kerusakan yang terjadi.
2. Frekuensi serta kecepatan perbaikan bangunan.
3. Dampak kerusakan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi.
4. Persepsi terhadap pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kondisi bangunan di kedua lokasi untuk memperkuat data yang diperoleh.

## Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis mengacu pada tahapan yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014)<sup>11</sup>, yaitu:

1. **Reduksi data**, dengan menyederhanakan dan memilih data yang relevan.
2. **Penyajian data**, dalam bentuk narasi deskriptif.
3. **Penarikan kesimpulan**, dengan mengidentifikasi pola hubungan antara penurunan kualitas bangunan, indikasi korupsi, dan biaya pemeliharaan ekonomi.

Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan interpretasi yang komprehensif terkait peran penurunan kualitas bangunan sebagai variabel mediasi.

## Etika Penelitian

Penelitian ini memperhatikan aspek etika dengan menjaga kerahasiaan identitas informan serta meminta persetujuan sebelum proses wawancara dilakukan. Data yang diperoleh digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan penelitian.

## Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan kualitas bangunan merupakan fenomena yang tidak terhindarkan seiring dengan bertambahnya usia bangunan serta kualitas konstruksi awal.

---

<sup>10</sup> Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd ed.).

<sup>11</sup> Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.).

Pada kedua lokasi penelitian, yaitu sekolah dan terminal, ditemukan berbagai bentuk kerusakan fisik, seperti cat yang mengelupas, munculnya jamur pada dinding, kerusakan fasilitas seperti bangku dan meja, serta kerusakan pada bagian struktural ringan seperti kebocoran atap.

Kerusakan tersebut berdampak pada tingkat kenyamanan pengguna bangunan. Informan dari kedua lokasi menyatakan bahwa kondisi bangunan yang mengalami penurunan kualitas dapat mengganggu aktivitas, baik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun aktivitas ekonomi di terminal. Selain itu, kondisi fisik bangunan juga mencerminkan citra pengelolaan suatu institusi atau fasilitas publik. Bangunan yang terawat dipersepsikan sebagai indikator pengelolaan yang baik, sedangkan bangunan yang rusak mencerminkan lemahnya pengelolaan.

Meskipun terdapat kesamaan dalam jenis kerusakan yang ditemukan, terdapat perbedaan yang signifikan dalam respons terhadap kerusakan di kedua lokasi. Pada sekolah, kerusakan bangunan ditangani secara cepat dan serius oleh pihak pengelola. Perbaikan dilakukan dalam waktu relatif singkat sehingga dampak negatif terhadap pengguna dapat diminimalkan.

Sebaliknya, pada terminal, kerusakan bangunan cenderung tidak ditangani secara optimal dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menyebabkan akumulasi kerusakan, seperti atap yang berlubang dan bangku tunggu yang tidak layak pakai. Menariknya, penjual dan masyarakat sekitar menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi terhadap kondisi tersebut. Mereka cenderung telah beradaptasi dan menganggap kondisi tersebut sebagai hal yang biasa. Namun demikian, dampak nyata tetap dirasakan, terutama saat hujan, di mana kebocoran atap menyebabkan beberapa area menjadi basah dan mengganggu aktivitas ekonomi.

## Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan kualitas bangunan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis seperti usia bangunan dan kualitas material, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola dan sistem pemeliharaan. Perbedaan antara sekolah dan terminal mencerminkan adanya variasi dalam kualitas pengelolaan yang berimplikasi langsung terhadap kondisi fisik bangunan.

Secara teoretis, hasil ini dapat dijelaskan melalui *agency theory*, yang menyatakan bahwa ketidaksejajaran kepentingan antara pengelola (agent) dan pemangku kepentingan (principal) dapat menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya (Jensen & Meckling, 1976).

<sup>12</sup>Dalam konteks terminal, lemahnya respons terhadap kerusakan dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam tata kelola, yang berpotensi berkaitan dengan praktik korupsi atau penyalahgunaan anggaran pemeliharaan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menguatkan peran penurunan kualitas bangunan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara korupsi dan biaya pemeliharaan ekonomi. Korupsi dapat berdampak pada penurunan kualitas konstruksi awal maupun pada tidak optimalnya proses pemeliharaan. Kondisi ini menyebabkan kerusakan bangunan terjadi lebih cepat dan lebih parah, sehingga meningkatkan kebutuhan biaya pemeliharaan dalam jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa korupsi berkontribusi terhadap rendahnya kualitas infrastruktur publik serta meningkatnya biaya ekonomi akibat inefisiensi (Tanzi & Davoodi, 1997).<sup>13</sup>

Selain itu, perbedaan respons antara sekolah dan terminal juga dapat dijelaskan melalui konsep manajemen pemeliharaan, khususnya *preventive maintenance*. Pada sekolah, perbaikan yang dilakukan secara cepat menunjukkan adanya upaya pemeliharaan preventif, sehingga kerusakan tidak berkembang menjadi lebih serius. Sebaliknya, pada terminal, kurangnya tindakan pemeliharaan mencerminkan pendekatan yang cenderung reaktif atau bahkan abai, yang pada akhirnya memperburuk kondisi bangunan.

Fenomena adaptasi pengguna terhadap kondisi bangunan yang rusak di terminal juga menunjukkan adanya normalisasi terhadap kualitas fasilitas publik yang rendah. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep toleransi institusional, di mana masyarakat secara bertahap menerima kondisi yang tidak ideal akibat keterbatasan pilihan atau rendahnya ekspektasi terhadap layanan publik. Namun demikian, meskipun terdapat adaptasi, dampak ekonomi tetap muncul, terutama dalam kondisi tertentu seperti hujan yang secara langsung mengganggu aktivitas penjual.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penurunan kualitas bangunan tidak semata-mata merupakan akibat dari faktor teknis, tetapi juga merupakan refleksi dari kualitas tata kelola. Peran mediasi yang dimainkan oleh kondisi bangunan menjadi penting dalam menjelaskan bagaimana korupsi dapat berdampak secara tidak langsung terhadap peningkatan biaya pemeliharaan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang tidak hanya

---

<sup>12</sup> Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

<sup>13</sup> Tanzi, V., & Davoodi, H. R. (1997). Corruption, public investment, and growth. IMF Working Paper No. 97/139



berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

## KESIMPULAN & SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksplorasi persepsi pengguna terhadap kondisi bangunan serta dampaknya pada aktivitas sosial dan ekonomi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penurunan kualitas bangunan terjadi di kedua lokasi penelitian (sekolah dan terminal), namun dengan tingkat keparahan dan respons pengelola yang berbeda. Kerusakan yang ditemukan meliputi cat mengelupas, jamur pada dinding, kerusakan fasilitas (bangku, meja), serta kebocoran atap.
2. Respons pengelola terhadap kerusakan sangat bervariasi. Sekolah menunjukkan respons yang cepat dan serius dalam melakukan perbaikan, sehingga dampak negatif terhadap aktivitas belajar mengajar dapat diminimalkan. Sebaliknya, terminal mengalami kelambatan pemeliharaan yang menyebabkan akumulasi kerusakan dan mengganggu aktivitas ekonomi, terutama saat hujan.
3. Perbedaan respons ini mengindikasikan adanya variasi kualitas tata kelola yang berpotensi berkaitan dengan praktik korupsi atau inefisiensi anggaran. Hasil penelitian memperkuat peran penurunan kualitas bangunan sebagai variabel mediasi antara korupsi dan peningkatan biaya pemeliharaan ekonomi jangka panjang.
4. Masyarakat pengguna terminal cenderung beradaptasi dengan kondisi bangunan yang rusak, yang mencerminkan adanya normalisasi terhadap kualitas fasilitas publik yang rendah. Namun demikian, dampak ekonomi tetap muncul secara nyata dalam situasi tertentu.
5. Pendidikan antikorupsi, integrasi nilai Pancasila, serta pemanfaatan media sosial merupakan instrumen preventif strategis untuk membangun integritas dan transparansi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas tata kelola pemeliharaan infrastruktur publik.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pengelola Fasilitas Publik (Terminal dan Sekolah)

- Meningkatkan sistem pemeliharaan preventif (preventive maintenance) secara terjadwal, tidak hanya reaktif terhadap kerusakan.
- Membentuk tim khusus pengawas pemeliharaan yang melibatkan partisipasi pengguna fasilitas (misalnya: komite sekolah, paguyuban pedagang terminal) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

### 2. Bagi Pemerintah dan Dinas Terkait

- Melakukan audit berkala terhadap anggaran pemeliharaan infrastruktur publik untuk mencegah potensi korupsi dan inefisiensi.
- Menerapkan sistem pelaporan kerusakan berbasis digital yang mudah diakses masyarakat, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara partisipatif.
- Mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dan nilai-nilai Pancasila dalam pelatihan teknis pengelola infrastruktur.

### 3. Bagi Masyarakat

- Tidak menormalisasi kondisi bangunan yang rusak, tetapi aktif melaporkan kerusakan kepada pengelola atau melalui saluran pengaduan resmi.
- Meningkatkan literasi antikorupsi dan partisipasi dalam pengawasan fasilitas publik.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur seberapa besar kontribusi korupsi terhadap peningkatan biaya pemeliharaan melalui penurunan kualitas bangunan.
- Memperluas lokasi penelitian ke berbagai jenis fasilitas publik lainnya (rumah sakit, pasar, jembatan) dengan metode campuran (mixed methods) untuk generalisasi yang lebih baik.
- Mengkaji efektivitas implementasi pendidikan antikorupsi berbasis kearifan lokal dalam konteks pengelolaan infrastruktur.

## Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Hasan, Z. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandar Lampung: CV. Zigie Utama.
- Hasan, Z. (2020). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 89-102.
- Hasan, Z. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45-60.
- Hasan, Z. (2023). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Z. (2025a). *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, Z. (2025b). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasan, Z., dkk. (2025). Peran Media Sosial dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi dan Integritas*, 3(1), 1-18.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kenny, C. (2007). *Corruption in infrastructure: Is there a link with construction quality?* World Bank Policy Research Working Paper, No. 4385. Washington, DC: World Bank.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Laffont, J. J., & Tirole, J. (1993). *A theory of incentives in procurement and regulation*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanzi, V., & Davoodi, H. R. (1997). *Corruption, public investment, and growth*. IMF Working Paper, No. 97/139. Washington, DC: International Monetary Fund.